

BAB I

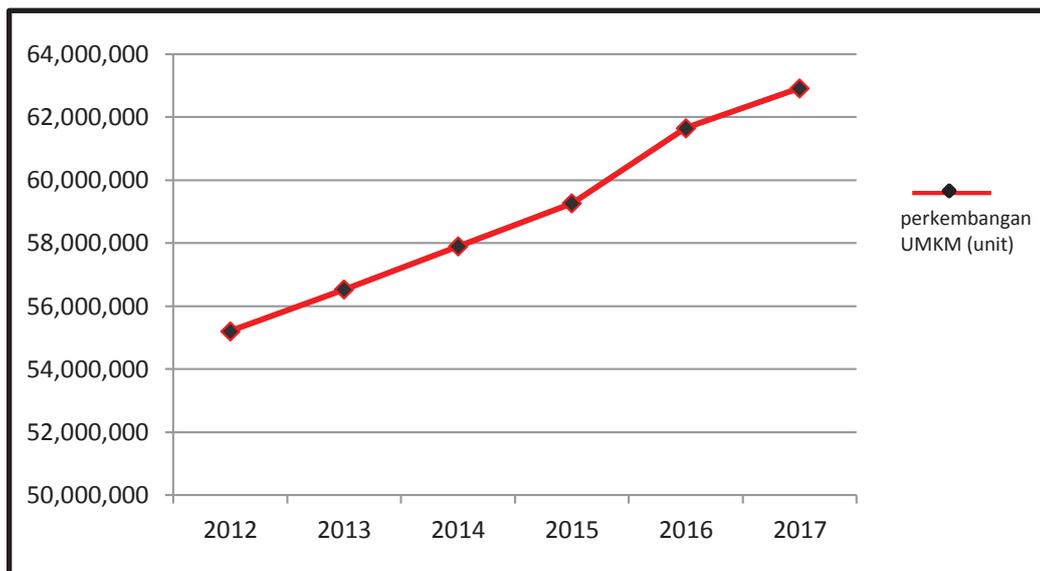
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak krisis moneter hingga saat ini UMKM memiliki peran yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena terbukti mampu menyerap tenaga kerja hingga 97,2%. Dengan presentase penyerapan tenaga kerja yang tinggi sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. seperti yang dipaparkan oleh meldoko dalam (Tribunnews.com, 2018). Sebagian karyawan terpaksa harus di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) banyak orang kehilangan pekerjaannya yang berakibat meningkatnya angka pengangguran, namun Selama krisis UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) telah terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usahanya, UMKM terbukti mampu bertahan hidup dan berkembang dimasa krisis melanda Indonesia. Banyak usaha yang berskala besar yang mengalami *stagnasi* bahkan berhenti aktivitasnya namun UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. (Karinayah, 2018).

Adapun alasan-alasan UMKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis karena sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, sebagian besar UMKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank, dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan

pekerjaanya sehingga para penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan jumlah unit UMKM meningkat (Pratomo Dan Soedjono, 2014). Berikut ini Grafik perkembangan data UMKM Tahun 2012-2017 :



Sumber : www.Depkop.go.id (data diolah)

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan UMKM 2012-2017

Perkembangan UMKM selama enam tahun terakhir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 55.206.444 unit, tercatat pada tahun 2013 – 2016 jumlah UMKM di Indonesia terus berkembang pesat hingga mencapai angka 61.651.177 unit dan pada tahun 2017 meningkat hingga 13,98% yakni sebesar 62.922.617 unit dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. (Depkop, 2018).

Pada era reformasi ini, pihak pemerintahan juga telah mulai banyak memberikan dukungan atau keberpihakan khususnya kepada industri mikro,

kecil dan menengah melalui beberapa perangkat regulasi dan/atau perundangan yang dikeluarkan seperti : undang-undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil, dan menengah dan keputusan menteri keuangan RI No.40/KMK.06/2003 tentang pendanaan kredit Usaha Mikro dan Kecil (Harsono, 2014).

Meskipun saat ini telah banyak program yang dilakukan pemerintah dalam bidang permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa didapatkan pada beberapa bank tertentu. Alasan UMKM tidak menggunakan dana atau modal dari pemberi kredit yaitu skala usaha yang masih kecil dan lama usaha yang masih baru (1-3 tahun). Alasan lainnya yaitu rumitnya persyaratan yang diberikan oleh pihak pemberi kredit. Salah satu syaratnya yaitu adanya informasi atas laporan keuangan UMKM yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Akan tetapi, banyak UMKM yang tidak menyediakan atau menyusun laporan keuangan dalam usahanya. Penyebabnya yaitu UMKM yang terlalu fokus pada proses produksi dan operasionalnya, sehingga tidak memperhatikan pencatatan atau pembukuan (Tuti, 2014). Terhitung hingga dari tanggal 31 Agustus 2019 total penyaluran kredit usaha rakyat sebesar Rp. 101.714.954.000.00 dengan jumlah debitur 3.623.087.



Sumber : <http://kur.ekon.go.id/>

Gambar 1.2 Realisasi Penyaluran KUR Tahun 2019

Salah satu sentra bisnis terbesar yang ada di Indonesia adalah Perkampungan Industri Kecil, penggilingan Jakarta timur dimana menurut catatan Dinas Koperasi UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta setidaknya 600 pelaku UMKM yang melakukan kegiatan usaha disana, usaha yang dilakukan pun sangat beragam mulai dari konveksi, sewa beli/jasa produk logam, garment, bordir komputer dan aneka usaha lainnya. (Dinas Koperasi UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, 2018)

Dalam menjalankan aktivitas usaha seringkali pelaku UMKM menghadapi permasalahan yang membuat UMKM sulit berkembang. terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Pertama, permasalahan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Kedua, permasalahan yang terkait dengan permodalan. Ketiga, masalah yang terkait dengan penguasaan teknologi dan keempat adalah permasalahan yang terkait dengan pemasaran produk maupun jasa dalam UMKM. Putri et al. (2015). Dalam penelitian Nurlela dan Heny (2016) juga mengatakan jika salah satu hambatan yang dialami oleh UMKM adalah ketidakmampuan pengusaha UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan sehingga sulit menentukan keuntungan atau kerugian yang dialami pengusaha UMKM.

Banyak riset yang menemukan bahwa sebagian UMKM masih belum dapat menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dengan tepat, karena SAK ETAP dianggap masih terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan UMKM.

Riset-riset tersebut memberikan rekomendasi untuk penyusunan suatu standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana untuk UMKM. (IAI, 2018).

Terkait hal tersebut untuk membantu UMKM agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (ED SAK EMKM) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 yang selanjutnya disebut SAK EMKM pada 24 Oktober 2016. SAK EMKM merupakan penyederhanaan dari SAK ETAP untuk usaha yang bersifat lebih mikro dan mulai efektif pada 1 Januari 2018. SAK EMKM ditujukan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor (IAI, 2018).

Persepsi pelaku UMKM juga mempengaruhi implementasi SAK EMKM, setiap pemilik memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai penggunaan SAK yang berlaku. Persepsi merupakan bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan baik peristiwa, objek maupun mausia (Dewi, 2017). Pemahaman dalam akuntansi juga dibutuhkan agar menjadi dasar dalam memahami dan mengimplementasikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Kemampuan dalam menangkap baik arti maupun makna dari bahan yang dipelajari merupakan suatu pemahaman (Winkel, 2004:274). Semakin baik pemahaman akuntansi yang dimiliki pemilik ataupun manajer, semakin bagus

kemampuan mereka dalam mengimplementasikan SAK EMKM ke dalam laporan keuangan. Dalam menerapkan SAK EMKM tidak hanya membutuhkan pemahaman namun juga kesiapan. Kesiapan dalam penelitian ini ialah keadaan pengelola UMKM yang membuatnya siap untuk memberikan jawaban dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan (knowledge) dalam penelitian ini dapat dilihat dari wawasan pengelola UMKM tentang laporan keuangan dan SAK EMKM. (Lailan, 2019)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rafiqah (2018) pada UMKM yang ada kota padang menunjukkan jika pelaku UMKM dikota padang sudah cukup siap dalam mengimplemantasikan SAK EMKM, namun masih belum memahami penggunaan SAK EMKM sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Hasil penelitian serupa didapat oleh Lailiyah (2018) yang meneliti penerapan SAK EMKM pada usaha kecil di Yogyakarta dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan jika empat usaha kecil di yogyakarta sudah siap untuk menerapkan SAK EMKM sedangkan dua usaha dinilai tidak siap menerapkan SAK EMKM. Hasil penelitian berbeda di peroleh oleh ahmad sholikin & ade setiawan (2018) dimana dalam penelitiannya terkait kesiapan UMKM terhadap implementasi SAK EMKM yang dilakukan di kabupaten blora menunjukkan dinilai tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM.

Dalam sudut pandang islam, dijelaskan bahwa Allah SWT melarang berputarnya harta (modal) hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Oleh

karena aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat menengah kebawah, yang notabeneanya mayoritas penduduk di suatu negara. Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan; “*kalian akan ditolong oleh sebab kaum dhuafa di antara kalian*”. Oleh karenanya kita mempunyai kewajiban menolong kaum lemah di negeri ini dengan mengembangkan UMKM secara bersama-sama . karena UMKM telah memberikan kontribusi nyata yang sangat berharga didalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Dalam menjalankan usaha Allah SWT memerintahkan untuk mencatat transaksi yang digunakan sebagai bukti. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ ...

“*Hai, orang-orang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya*” (QS. Al-Baqarah [2]:282)

Dari ayat ini disimpulkan bahwa dalam islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan (*faktubuh*). Pencatatan ini dimaksudkan untuk memelihara harta agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mengetahui hak yang dimilikinya baik kecil maupun besar. Tentunya ini juga berlaku bagi UMKM

untuk melakukan pencatatan keuangan, karena setiap hari pasti terjadi kegiatan operasional yang akan menimbulkan transaksi. Lalu dalam mencatat transaksi UMKM dapat menggunakan SAK EMKM yang telah disahkan oleh IAI sebagai dasar standar dalam pencatatan transaksi.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang **“Analisis Persepsi, Pemahaman Dan Kesiapan UMKM Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pelaku UMKM Bidang Sewa Jasa/ Beli Produk Logam Perkampungan Industri Kecil, Jakarta Timur)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di uraikan di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan berbasis SAK EMKM?
- b. Bagaimana pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan berbasis SAK EMKM?
- c. Bagaimana kesiapan pelaku UMKM terhadap laporan keuangan berbasis SAK EMKM?
- d. Bagaimana persepsi pelaku UMKM, pemahaman dan kesiapan UMKM terhadap laporan keuangan berbasis SAK EMKM ditinjau dari sudut pandang islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah di rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan berbasis SAK EMKM.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan berbasis SAK EMKM.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesiapan pelaku UMKM terhadap laporan keuangan berbasis SAK EMKM.
- d. Untuk mengetahui bagaimana persepsi, pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM terhadap laporan keuangana berbasis SAK EMKM ditinjau dari sudut pandang islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pelaku UMKM dalam bidang akuntansi khususnya mengenai implementasi SAK EMKM dalam penyajian laporan keuangan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi DSAK (Dewan Standar Akuntansi Indonesia) untuk melihat seberapa paham dan

siapakah UMKM dalam menerapkan SAK EMKM laporan keuangan berbasis SAK EMKM, DSAK dapat menilai langkah sosialisasi apa yang harus dilaksanakan untuk mengubah persepsi UMKM , meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kesiapan pelaku UMKM tersebut.